OPTIMALISASI KERJASAMA TNI AL DENGAN PERHUBUNGAN LAUT DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA

Awang Suryawan¹⁾, Edi Susilo²⁾, Jumino³⁾
Markas Besar Angkatan Laut Sekolah Staf Dan Komando
e-mail: suryawan.awang@yahoo.co.id^{1,2,3)}

Abstract

Through various programs and policies in the maritime sector, the Joko Widodo Government has a target of making Indonesia move up the class from a country with a lower middle level to a country with an upper middle income level. Indonesia is expected to become a maritime country that is developed, independent and strong, equal to other developed countries. Maritime policy is taken as an effort to save the country's economy from the maritime sector, which is quite large in number which so far tends not to be optimally utilized and evaporates through illegal fishing, illegal logging, illegal mining, smuggling of fuel oil and various other illegal activities. The Indonesian Navy and the Indonesian Ministry of Transportation are two agencies that have interests and authority in the sea, and become the backbone of the government in overseeing maritime aspects of the program. Cooperation between the two agencies is absolutely necessary, so that various policies and programs that have been determined can be achieved as expected. Cooperation in infrastructure and connectivity needs to be improved. Increased cooperation in the field of personnel. Cooperation in the field of maritime security operations needs to be optimized.

Keywords: *Maritime, Cooperation, Country Economy*

Abstrak

Melalui berbagai program dan kebijakan dalam bidang maritim, Pemerintah Joko Widodo mempunyai target menjadikan Indonesia naik kelas dari negara dengan tingkat menengah bawah ke negara dengan tingkat penghasilan menengah atas. Indonesia diharapkan menjadi negara maritim yang maju, mandiri dan kuat, setara dengan negara maju lainnya. Kebijakan maritim diambil sebagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian negara dari sektor maritim yang jumlahnya cukup besar yang selama ini cenderung belum termanfaatkan secara optimal serta menguap melalui *illegal fishing, illegal logging, illegal mining*, penyelundupan bahan bakar minyak dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. TNI AL dan Kemenhub RI merupakan dua instansi yang memiliki kepentingan dan kewenangan di laut, dan menjadi tulang punggung pemerintah dalam mengawal program aspek maritim. Kerjasama antara dua instansi ini mutlak diperlukan, sehingga berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Kerjasama dalam bidang infrastruktur dan konektivitas perlu ditingkatkan. Peningkatan kerjasama dalam bidang personel. Kerjasama dalam bidang operasi keamanan laut perlu dioptimalkan.

Kata kunci: *Maritim, Kerjasama, Perekonomian Negara*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau dan panjang garis pantai kurang lebih dari 81.000 km serta luas laut yang mencapai 3,1 juta Km². Dalam amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, pasal 25 A tercantum "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang" (Prabowo, 2017). Dengan konsep negara kepulauan ini, Indonesia memiliki hak

penyusutan atas perairan di sisi-sisi pulau tersebut, serta berhak atas semua yang ada di dasar laut dan di ruang angkasa wilayahnya. Sebagai negara kepulauan yang berada pada posisi sentral dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Hal ini merupakan modal bangsa yang dapat digunakan untuk mencapai kejayaan. Indonesia dengan posisi dan potensi tersebut mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjadi negara maritim yang berbasis sumber daya alam. Potensi ini dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan dengan tingkat kerawanan yang tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Posisi Indonesia sangat terbuka bagi negara lain untuk memasuki wilayah Indonesia melalui laut dan melakukan aktivitas di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, sehingga negara perlu memperhatikan kondisi keamanan maritimnya. Keamanan maritim negeri ini juga dipengaruhi oleh geopolitik Indonesia. Permasalahan yang umum terjadi terkait dengan keamanan maritim yang harus ditangani yaitu perampokan laut, serangan bajak laut, terorisme maritim, degradasi lingkungan, penculikan maritim, *illegal trafficking* senjata dan manusia, penyelundupan narkoba melalui laut (kapal barang/container), keamanan lingkungan maritim, kompetisi sumber daya dan akses strategis, pencurian kargo, dan lain-lainnya (Masdiana,2017). Atas dasar itu, maka ancaman yang dihadapi Indonesia berupa ancaman pelanggaran hukum, ancaman kekerasan, dan ancaman terhadap sumber daya laut pembajakan, perompakan, pencemaran dan pengrusakan ekosistem laut, konflik pengelolaan sumber daya laut, *illegal fishing* dan penyelundupan. Ancaman tersebut berdampak pada perekonomian negara yang setiap tahun sedikitnya Rp 300 triliun kekayaan negara menguap melalui *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal mining*, penyelundupan bahan bakar minyak, dan berbagai kegiatan ekonomi ilegal lainnya (Dahuri,2014). Permasalahan tersebut timbul karena buruknya konektivitas maritim yang mengakibatkan biaya logistik menjadi tinggi dan termahal di dunia serta banyak pihak yang melakukan kegiatan di wilayah maritim Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional (Lemhanas,2012). Ini didukung dengan kebijakan pembangunan kelautan masih dilakukan secara parsial, dengan masing-masing kementerian/lembaga menjalankan program pembangunannya sendiri-sendiri, belum komprehensif, dan belum terintegrasi dengan kementerian/lembaga yang mempunyai konsentrasi terhadap pembangunan kelautan. Saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat,

termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga nantinya kemandirian maritim dapat terwujud. Adapun kemandirian bangsa menurut visi Presiden dapat dilihat dari kemampuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Konektivitas menjadi poin penting dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk meningkatkan konektivitas, pemerintahan Presiden Joko Widodo membangun Tol Laut. Tol Laut merupakan konektivitas angkutan laut yang efektif secara terjadwal melayani kapal dari Barat ke Timur Indonesia (Rachman, 2017). Berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti melihat bahwa pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dalam rangka Kebijakan Poros Maritim Dunia saat ini masih dipandang hanya berfokus pada penyebaran logistik demi mewujudkan pemerataan harga serta membangun pusat-pusat ekonomi baru. Peneliti memandang bahwa dalam konektivitas maritim, meskipun pelabuhan dan armada kapal memiliki peran vital namun perlu juga disadari bahwa peran institusi pengamanan maritim memiliki peranan yang penting untuk menjaga terciptanya jalur perdagangan dan transportasi di perairan Indonesia yang kondusif, sebagaimana yang diejawantahkan dalam Pilar Kelima yakni penguatan pertahanan maritim. Sejak tahun 2005, TNI AL dan Kementerian Perhubungan RI telah menjalin kerjasama melalui Piagam Kesepakatan Bersama antara Departemen Perhubungan RI dengan TNI AL Nomor KM 52 Tahun 2005 (PKB/09/IX/2005) tentang Peningkatan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Kerjasama ini merupakan upaya bersama dari TNI AL dan Kementerian Perhubungan RI dalam rangka meningkatkan kegiatan pengamanan dan penegakkan hukum di laut, secara terpadu dan terkoordinir untuk menjamin terwujudnya keamanan di laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo kerjasama antara TNI dan Kementerian Perhubungan kembali dilanjutkan melalui Nota Kesepahaman Nomor PM. 47 Tahun 2015 (Nomor:Kerma/6/II/2015) tentang Bantuan TNI kepada Kementerian Perhubungan meliputi peningkatan pengamanan sarana dan prasarana transportasi serta membantu Penegakan Hukum di lingkungan Transportasi Darat, Transportasi Laut, Transportasi Udara dan Transportasi Perkeretaapian. Akan tetapi saat ini implementasi Nota Kesepahaman tersebut masih berupa kerjasama yang bersifat situasional, tidak berkesinambungan dan kurang optimal. Sebagai contoh dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim pelibatan TNI AL masih sangat kurang padahal dengan sumber daya yang dimiliki TNI AL seperti Pusat Hidrografi dapat berperan dalam memberikan

kontribusi dalam penentuan lokasi yang tepat untuk pembangunan pelabuhan dan alur navigasi. Seperti contoh saat ini ada beberapa pelabuhan yang baru dibangun tetapi tidak bisa digunakan. Demikian juga dalam bidang operasional kerjasama pengamanan pelabuhan dan jalur pelayaran masih belum maksimal sehingga masih banyak terjadi kecelakaan kapal dan adanya penyelundupan barang-barang illegal dan terlarang lewat Pelabuhan, selanjutnya dalam kerjasama dibidang penggunaan data dan informasi hanya terbatas apabila ada permintaan dari masing-masing instansi saja. Peneliti menyadari bahwa penguatan pertahanan dan keamanan maritim harus dilakukan secara integratif antara TNI AL dan Kementerian Perhubungan, dengan memperkuat dan membangun kapabilitas pengawasan maritim yang komprehensif agar mampu mengawasi dan menindaklanjuti secara seketika berbagai masalah keamanan maritim di seluruh wilayah kedaulatan dan yurisdiksi laut nasional. Oleh karena itu, dalam Taskap ini peneliti akan melakukan penelitian dan pengembangan kerjasama antara TNI AL dengan Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub RI secara khusus dari perspektif pertahanan dan keamanan maritim. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengelaborasi kondisi faktual kerjasama TNI AL dan Kementerian Perhubungan dalam konteks keamanan maritim, sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang mengatur tentang keamanan maritim, koordinasi dan sinergi antara TNI AL dengan Kementerian Perhubungan, serta optimalisasi peran TNI AL dalam perwujudan Poros Maritim Dunia dalam kerangka kerjasama yang lebih kuat dan terintegrasi.

2. METODE

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Kualitatif, dengan pola pikir induktif, serta disajikan secara deskriptif. Sementara data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang lebih bersifat primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, melalui studi pustaka terkait sumber bacaan berupa buku-buku, dokumen perundang-undangan, penyajian rangkuman data (reduksi) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan data dengan ketekunan pengamatan dan uraian rinci. Teknik pengumpulan data akan dibagi dalam pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer yang dilakukan peneliti bertujuan, untuk mendapatkan pengumpulan data yang selengkap mungkin mengenai kerjasama antara TNI AL dan Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub RI dengan cara studi literatur dan interview dengan

Pejabat TNI AL dan Pejabat Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub RI. Pengambilan data primer akan dilakukan dengan wawancara terarah secara langsung atau tatap muka kepada pejabat yang berwenang di lembaga-lembaga yang terkait serta beberapa narasumber yang mengetahui dan/atau memahami serta terkait langsung dengan obyek penelitian. Peneliti juga melakukan pengumpulan data sekunder guna mendapatkan data tentang pengamanan dan keamanan maritim serta pembangunan infrastruktur konektivitas laut baik dari buku, berbagai instrumen Hukum Nasional, artikel, media massa, makalah serta jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah yang tengah dibahas. Selain itu, penelitian ini juga mempergunakan data sekunder berupa inventarisasi berbagai instrumen hukum nasional dan Kesepakatan Bersama atau Nota Kesepahaman yang dipakai sebagai landasan bertindak oleh TNI AL dan Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dalam melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di laut maupun di sekitar infrastruktur konektivitas maritim. Peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dalam upaya analisis dan interpretasi terhadap kondisi-kondisi yang terjadi terkait kondisi terkini pembangunan infrastruktur konektivitas maritim dan sinergitas upaya pengamanan jalur pelayaran nusantara antara TNI AL dan Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Kerjasama TNI AL dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub RI.

Upaya untuk meningkatkan kerjasama antara TNI AL dengan Kementerian Perhubungan RI telah dilakukan sejak tahun 2005 dalam rangka meningkatkan kegiatan pengamanan dan penegakkan hukum di laut secara terpadu dan terkoordinir. Selain itu pada tahun 2015 kerjasama kembali dilanjutkan terkait dengan bantuan TNI kepada Kementerian Perhubungan yang meliputi peningkatan pengamanan sarana dan prasarana transportasi serta membantu Penegakan Hukum di lingkungan Transportasi Darat, Transportasi Laut, Transportasi Udara dan Transportasi Perkeretaapian. Berbagai upaya tersebut di beberapa aspek cukup optimal, akan tetapi pada aspek lainnya terutama dalam bidang operasional masih belum sesuai dengan harapan. Beberapa aspek yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim yang belum optimal, ditandai oleh minimnya sarana Angkutan Laut, Pelabuhan/Dermaga, Armada Patroli Laut, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya kerjasama bidang personel baik dari aspek pembinaan maupun operasionalisasi personel TNI AL dengan Kemenhub RI. Kerjasama dalam bidang keamanan maritim antara kedua instansi juga belum

optimal yang disebabkan oleh kurang sinerginya aturan dan kebijakan, tumpang tindihnya kewenangan dan belum optimalnya kerjasama dalam bidang latihan pengamanan. Dari beberapa permasalahan tersebut, dan dengan melihat kondisi yang ada maka kerjasama antara TNI AL dengan Kemenhub RI perlu dioptimalkan sehingga tujuan dan harapan yang diinginkan dapat tercapai. Nota kesepahaman antara kedua instansi telah dibuat dan disepakati, yang perlu dilakukan adalah realisasi dari berbagai kesepakatan tersebut terutama pada tahap operasional. Hal-hal yang masih dianggap kurang ataupun belum mampu mendukung upaya kerjasama perlu ditingkatkan dan dicarikan solusi melalui komunikasi dua arah secara proaktif, terutama dalam hal anggaran dan penetapan waktu dan kegiatan. Selain itu, pengalokasian segenap sumber daya dari kedua instansi perlu dioptimalkan mengingat beratnya tugas dan kewenangan yang diberikan. Harapan dari terjalinnya kerjasama ini adalah semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas dibidang maritim, baik dalam hal peningkatan jumlah kapal angkut, kapal patroli, dermaga/pelabuhan, sarana navigasi, maupun sarana prasarana pendukung lainnya. Dari aspek personel/SDM, harapan yang diinginkan adalah adanya peningkatan kualitas, profesionalisme, dan kerjasama proaktif dalam berbagai kegiatan. Sedangkan dalam pengamanan maritim, harapannya adalah terjadinya sinergitas antara kedua instansi terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun dukungan kebutuhan terkait dengan pengamanan laut sehingga penegakkan hukum di laut dapat terlaksana dan seluruh wilayah yuridiksi nasional dapat terjaga dan terlindungi.

Meningkatkan peran TNI AL.

Pelaksanaan kerjasama antara TNI AL dengan Kementerian Perhubungan RI selain merupakan salah satu solusi peningkatan pembangunan sektor maritim, juga merupakan amanat Undang-undang dalam membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia. Output dari pelaksanaan kerjasama ini adalah meningkatnya peran TNI AL sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 terdapat lima tugas utama TNI AL. Pertama, melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan yaitu tugas militer dalam rangka mempertahankan wilayah NKRI dari berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang dapat membahayakan keutuhan wilayah serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi atau dapat juga disebut peran polisionil terutama terkait dengan penegakan hukum dari berbagai

tindak ilegal dan upaya pelanggaran hukum seperti perompakan, *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal trafficking*, *illegal fishing* dan lain sebagainya. Ketiga, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, hal ini diperlukan agar setiap kebijakan maritim pemerintah dapat bersinergi dan mendapatkan dukungan internasional. Keempat, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, baik dalam hal personel, material maupun perumusan aturan dan kebijakan. Kelima, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut, berupa pembinaan potensi maritim. TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut berkewajiban untuk menjaga integritas wilayah NKRI dan mempertahankan stabilitas keamanan di laut serta melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan konsepsi dasar bahwa perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Dengan adanya kerjasama antara TNI AL dengan Kementerian Perhubungan diharapkan berbagai peran dan fungsi TNI AL baik dalam upaya meningkatkan pertahanan dilaut maupun peningkatan sumber daya maritim dapat lebih optimal.

Mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia.

Upaya pemerintah dalam rangka mensejajarkan Indonesia dengan negara maju lainnya salah satunya adalah peningkatan potensi maritim yang dinilai cukup besar, akan tetapi sering kali pembangunannya terabaikan terutama pada periode pemerintahan Orde Baru. Kebijakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan kebijakan solutif dan sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi Indonesia, hal ini karena sektor maritim menyimpan potensi hayati dan non hayati yang belum seluruhnya termanfaatkan. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya berakibat pada meningkatnya kebutuhan terhadap sumber pangan, energi dan mobilitas yang tinggi. Jika hanya mengandalkan potensi yang ada di darat maka dalam beberapa tahun kedepan tidak akan terpenuhi dan justru menimbulkan persaingan yang berujung pada konflik sosial. Oleh karenanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini sangatlah tepat dan mampu menjawab persoalan yang ada. Dalam rangka mendukung kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia, peran TNI AL sangat diperlukan karena memiliki kewenangan dan domain dilaut. Selain itu kerjasama lintas sektor menjadi suatu

keharusan karena pembangunan sektor laut melibatkan banyak sektor dan banyak kepentingan. Harapan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kerjasama antara TNI AL dengan Kementerian Perhubungan RI adalah semakin terjalinnya kerjasama yang lebih erat terutama dalam bidang infrastruktur dan konektivitas maritim, bidang personel/SDM dan bidang keamanan maritim, akan tetapi upaya untuk mewujudkan hal tersebut banyak dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan internal (lingkup TNI AL dan Kemenhub RI) dan lingkungan eksternal (Global, Regional dan Nasional) yang turut serta menimbulkan beberapa peluang dan kendala. Akan tetapi bukan hal yang mustahil jika seluruh *stakeholder* yang terlibat mampu melaksanakan berbagai peran dan fungsinya sesuai dengan kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang harus dilakukan. Kebijakan, Strategi dan Upaya yang telah ditentukan diharapkan mampu dilaksanakan mulai dari tahap kebijakan, pembuatan aturan, sampai pada tingkat operasionalnya sehingga berbagai persoalan yang dihadapi dapat dicarikan solusi dan pemecahannya. Jika kerjasama sama antara TNI AL dengan Kementerian Perhubungan RI semakin optimal maka TNI AL akan mampu mengemban peran terutama dalam peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi. Sehingga harapan untuk mewujudkan kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat tercapai.

Pemecahan Masalah.

Perumusan kebijakan merupakan pedoman dasar dalam menentukan strategi pencapaian sebelum diaktualisasikan dalam bentuk upaya-upaya nyata. Sebagai pemecahan masalah, selanjutnya akan dirumuskan dan disusun kebijakan, strategi dan upaya. Perumusan kebijakan sebagai solusi dari masalah dan pokok persoalan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal untuk mencapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan indikator keberhasilan.

Kebijakan.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, memberikan tantangan tersendiri bagi TNI AL dan Kemenhub RI, untuk dapat berkontribusi secara aktif bersinergi dalam upaya-upaya peningkatan kerjasama, baik dalam aspek infrastruktur dan konektivitas maritim, aspek personel/SDM, maupun aspek keamanan maritim. Oleh karena itu perlu dirumuskan suatu kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, strategi yang dikembangkan juga harus memperhatikan indikator keberhasilan pada tataran optimalisasi kerjasama antara TNI AL dengan Kemenhub

RI, meningkatnya peran TNI AL dan mendukung kebijakan poros maritim dunia. Penentuan kebijakan menjadi sebuah rumusan untuk mengarahkan semua langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. kebijakan telah ditetapkan adalah bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepakatan dalam penyiapan, pelaksanaan dan evaluasi pada setiap kegiatan dan operasi. Kebijakan yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut : “Terwujudnya optimalisasi kerjasama antara TNI AL dengan Perhubungan Laut Kemenhub RI melalui pengoptimalan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pengoptimalan kerjasama bidang personel/SDM dan perngoptimalan kerjasama bidang keamanan maritim, guna meningkatkan peran TNI AL dalam mendukung kebijakan poros maritim dunia”. Optimalisasi kerjasama kedua lembaga ini tidak hanya cukup sebatas teori diatas kertas saja karena *outcome* dari optimalisasi tersebut adalah kemampuan, kemauan, dan kompetensi serta meniadakan ego sektoral dari kedua belah pihak dimana kepentingan akan tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah yang paling diutamakan.

Strategi.

Setelah merumuskan kebijakan yang akan diambil, selanjutnya diperlukan perumusan strategi-strategi sesuai dengan lingkup permasalahan yang ada. Strategi diwujudkan melalui suatu langkah atau cara (*ways*) menggunakan daya, dana, sarana dan prasarana (*means*) dalam mencapai sasaran (*ends*) dengan mengatur skala prioritas terhadap sasaran yang ingin dicapai. Strategi yang tepat dapat dijadikan acuan dalam menentukan upaya-upaya yang akan dilakukan. Adapun strategi-strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Strategi – 1. Merumuskan bentuk kerjasama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim yang optimal dengan rumusan kebijakan anggaran, peningkatan pembangunan sarana angkut, patroli dan kepelabuhanan guna memperlancar kegiatan dan operasi. Strategi ini dibuat untuk mempertajam berbagai upaya yang harus dilakukan terkait dengan kondisi infrastruktur dan konektivitas maritim yang diharapkan. Strategi ini selaras dengan teori yang dikemukakan Alfred Thayer Mahan yang telah dijelaskan bahwa diperlukan kombinasi antara armada dagang yang berkembang dan kekuatan Angkatan Laut sebagai pelindungnya dari segala kegiatan di darat dan di laut yang menyokong keduanya. Armada dagang (niaga) yang beroperasi di wilayah Indonesia bukan hanya armada dagang dalam negeri, tetapi Indonesia yang memiliki jalur ALKI juga berkewajiban melindungi armada dagang negara lain yang melalui jalur tersebut dan merupakan konsekwensi dari negara

kepulauan. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan infrastruktur maritim sangat dibutuhkan untuk menjaga kepentingan-kepentingan nasional dan merupakan syarat penting untuk membentuk negara maritim yang kuat.

Strategi – 2. Merumuskan bentuk kerjasama dibidang personel yang optimal melalui pembinaan karier dan penempatan jabatan guna meningkatkan kemampuan dalam pengawakan organisasi. Selain infrastruktur dan konektivitas maritim, hal yang perlu dirumuskan adalah strategi yang berkaitan dengan personel, baik dalam hal rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan, serta peningkatan kemampuan dan profesionalismenya. Hal ini diperlukan agar setiap personel memiliki kemampuan mumpuni untuk mendukung setiap kegiatan karena merupakan salah satu kunci penting dalam setiap keberhasilan tugas. Strategi ini sejalan dengan teori Sinergi yang dikemukakan Stephen R. Covey, yang menekankan pada kerjasama kreatif, berfungsi sebagai katalisator, menyatukan dan melepaskan kekuatan terbesar dalam diri manusia dalam melaksanakan suatu tugas sehingga menghasilkan output yang terbaik. Kerjasama dalam bidang personel antara TNI AL dan Kemenhub RI sangat dibutuhkan untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, sinergitas, dan integritas antar personel sehingga mampu mewujudkan keberhasilan tugas.

Strategi – 3. Merumuskan kerjasama dibidang keamanan maritim yang optimal dan terpadu dengan perencanaan bersama, pelibatan KRI dan KPLP Kemenhub dalam operasi yang digelar bersama guna peningkatan kemampuan patroli keamanan laut. Strategi ini lebih menitik-beratkan pada aspek kerjasama keamanan maritim yang menjadi tanggung jawab TNI AL dan Kemenhub RI. Kemenhub RI bertanggung jawab atas setiap kegiatan pelayaran di wilayah teritorial, sedangkan TNI AL berkewenangan untuk mengcover seluruh wilayah perairan Indonesia sampai pada batas ZEE. Kerjasama yang optimal dan terpadu sangat dibutuhkan agar setiap kegiatan mulai dari tahap perencanaan program, penyesuaian waktu, pelaksanaan kegiatan, dan kebutuhan yang diperlukan dapat bersinergi dan terintegrasi. Keamanan maritim menjadi suatu sistem keamanan yang multi sektor, multi moda, dan multi kompleks. Akan tetapi, jika antar instansi menghilangkan sifat ego sektoral dan bertekad bersama untuk bersinergi, maka beberapa kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki akan saling tertutupi. Selain itu, kekuatan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing instansi akan saling berkontribusi menuju kondisi yang diinginkan.

Upaya.

Sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan dalam mengoptimalkan kerjasama

antara TNI AL dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub RI maka untuk mewujudkan serta mengimplementasikan strategi-strategi di atas, perlu adanya *break down* atau penjabaran yang merupakan cara atau tindakan nyata yang berisi siapa yang berbuat (subjek), terhadap apa (objek), dan dengan cara apa (metode), dalam bentuk upaya-upaya sebagai berikut :

Upaya untuk mendukung strategi-1. Merumuskan bentuk kerjasama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim yang optimal dengan rumusan kebijakan anggaran, peningkatan pembangunan sarana angkut, patroli dan kepelabuhanan guna memperlancar kegiatan dan operasi, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian pertahanan merumuskan kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur maritim dan merealisasikan anggaran tersebut pada tahun 2019 dengan besaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
- b) Kementerian Perhubungan RI melalui perusahaan BUMN bidang perkapalan melaksanakan pembangunan Kapal Perintis minimal sejumlah 50 unit sampai dengan tahun 2019.
- c) Kementerian Perhubungan RI melalui perusahaan BUMN bidang perkapalan melaksanakan pembangunan Kapal Pelayaran Rakyat minimal sejumlah 25 unit sampai dengan tahun 2019.
- d) Kementerian Pertahanan RI melalui TNI AL bekerjasama dengan PT. PAL membangun Kapal Patroli Maritim (KAL) yang dilengkapi dengan sarana komunikasi dan navigasi maupun kesenjataan berteknologi tinggi minimal sejumlah 5 unit sampai dengan tahun 2019.
- e) Kementerian Perhubungan RI membangun Pelabuhan Utama (3 Pelabuhan), Pelabuhan Pengumpul (10 Pelabuhan), Pelabuhan Pengumpan Regional (5 Pelabuhan) dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (15 Pelabuhan) sampai dengan tahun 2019.
- f) Kementerian Perhubungan RI membangun sistem informasi berbasis teknologi (CCTV dan GPS) yang terintegrasi pada setiap kapal dan pelabuhan untuk mengetahui segala kegiatan secara *realtime*, sehingga dapat digunakan sebagai sarana kendali dan *updating* data sesuai dengan kebutuhan.

Upaya untuk mendukung strategi-2. Merumuskan bentuk kerjasama dibidang personel yang optimal melalui pembinaan karier dan penempatan jabatan guna meningkatkan kemampuan dalam pengawakan organisasi.

- a) Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi (MenPAN-RB) menyelenggarakan rekrutmen PNS untuk Kemenhub RI sesuai dengan pengajuan Kemenhub RI dihadapkan dengan kebutuhan dan wilayah penugasan.
- b) Pemerintah dalam hal ini MenPAN-RB menerapkan sistem merit (kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan) pada setiap pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan khususnya pada lingkup Kemenhub RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - c) Kementerian Pertahanan mencabut kebijakan *zero growth* bagi TNI untuk memenuhi kebutuhan DSP mengingat luasnya wilayah dan tuntutan tugas/ operasi dari berbagai bentuk ancaman dan kegiatan illegal di wilayah laut Indonesia.
 - d) TNI AL dalam hal ini Aspers Kasal melaksanakan penempatan personel TNI AL di Kemenhub RI yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan disesuaikan dengan kompetensinya dan melaksanakan rotasi sesuai dengan aturan yang ada.
 - e) TNI AL melaksanakan koordinasi dengan Kemenhub RI secara rutin terkait personel TNI AL yang melaksanakan BKO di Kemenhub RI agar tetap terpantau dan mampu melaksanakan pembinaan karier dan penempatan jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - f) TNI AL dan Kemenhub RI melaksanakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel khususnya terkait dengan sistem navigasi dan hidrografi yang diaplikasikan dalam kegiatan operasi maupun latihan pengamanan laut.

Merumuskan kerjasama dibidang keamanan maritim yang optimal dan terpadu dengan perencanaan bersama, pelibatan KRI dan KPLP Kemenhub dalam operasi yang digelar bersama guna peningkatan kemampuan patroli keamanan laut. TNI AL dan Kemenhub RI melaksanakan kerjasama dalam penggunaan kapal patroli (KRI dan KPLP) dan pesawatintai maritim dalam operasi kemanan laut termasuk perawatan dan pemeliharannya secara terpadu dan kontinue. TNI AL melaksanakan koordinasi dengan Kemenhub RI terkait dengan kegiatan operasi pengamanan maritim yang akan digelar sehingga terjadi sinergi antara waktu, kebutuhan, dan pelaksanaan operasi. Kemenhub RI bekerjasama dengan perusahaan galangan kapal melaksanakan pembangunan kapal partoli kelas II sebanyak minimal 3 unit dan kapal kelas III minimal 5 unit sampai tahun 2019 yang dilengkapi dengan sarana

prasarana pendukung berteknologi tinggi untuk mendukung kegiatan patroli keamanan laut. TNI AL dan Kemenhub RI melaksanakan pertukaran informasi terkait dengan kegiatan patroli dan berbagai potensi ancaman maupun potensi pelanggaran keamanan di wilayah laut untuk bersama-sama bersinergi dalam hal penindakan dan penegakkan hukum di laut.

Gambar 1. Foto Kegiatan

4. SIMPULAN

Dari uraian tentang Optimalisasi kerjasama antara TNI AL dengan Perhubungan Laut Kemenhub RI guna meningkatkan peran TNI AL dalam rangka mendukung kebijakan poros maritim dunia yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam bidang infrastruktur dan konektivitas perlu ditingkatkan, hal ini karena tingginya kebutuhan sarana transportasi laut dalam distribusi orang, barang maupun jasa. Selain itu infrastruktur patroli laut berikut sarana dan prasarana pendukung lainnya juga sangat dibutuhkan untuk menjamin kamanan dilaut. Ketersediaan infrastruktur mampu mendukung program-program pemerintah seperti pemangkasan biaya pengiriman, sehingga penyeteraan harga barang di beberapa wilayah Indonesia dapat tercapai. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim sudah dapat dirasakan terutama oleh warga Indonesia bagian Timur yang sebelumnya beberapa harga kebutuhan pokok seperti Sembako, BBM dan Bahan Bangunan lebih mahal, saat ini menjadi lebih terjangkau. Demikian halnya dengan bertambahnya rute transportasi laut yang dilengkapi dengan ketersediaan Dermaga dan Pelabuhan baru mampu meningkatkan mobilitas ataupun pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan kegiatan perekonomian dan lain sebagainya.

Salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan adalah peningkatan kerjasama dalam bidang personel, hal ini karena adanya beberapa permasalahan terutama dalam pembinaan karier dan penempatan jabatan serta sinergitas antar personel di lingkup TNI AL dan

Kementerian Perhubungan RI. Hal ini terkait pula dengan kompetensi dan profesionalisme serta integritas personel yang ada, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut dengan menggunakan strategi *rekrutment* yang terbuka dan *kredibel*, pembinaan karier yang komprehensif dan penempatan jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalismenya. Berbagai upaya ini dilakukan agar setiap personel mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Kerjasama dalam bidang operasi keamanan laut perlu dioptimalkan. Hal ini diperlukan karena selama ini pengamanan laut masih belum mampu mencakup diseluruh wilayah laut Indonesia karena beberapa permasalahan dan kondisi. Kerjasama antara TNI AL dan Kementerian Perhubungan dalam sektor keamanan laut sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana dilaut seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, *illegal trafficking*, perompakan, pembajakan dan kegiatan pidana lainnya. Kerjasama ini juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran patroli laut dari Kementerian Perhubungan RI (KPLP) yang selama ini dipandang belum optimal, selain untuk lebih meningkatkan peran KRI dan KAL agar kegiatan operasi dan patroli laut dapat lebih sering dilakukan. Operasi udara yang digelar Kemenhub RI juga diharapkan mampu melibatkan Pesawat intai maritim yang dimiliki TNI AL, sehingga upaya pengamanan wilayah maritim dan penegakkan hukum di laut dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Kajian Lemhanas RI Penataan Pengamanan Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI., Edisi 14, Desember 2012.
- Masdiana.2017. *Penguatan Keamanan Maritim Indonesia : Memahami Ancaman Keamanan Maritim dan Rekonstruksi Kemaritiman Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. Jurnal Gema Keadilan,4 (1),<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3655>
- Prabowo, H.H. dan Salahudin, M. 2016. *Potensi Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil Terluar Wilayah NKRI*.Jurnal Geologi Kelautan, 14(2), <http://ejournal.mgi.esdm.go.id/index.php/jgk/article/view/356>
- Dahuri, R.2014. *Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. Media Indonesia, <https://ekoharsono.wordpress.com/2014/09/10/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/>
- Rachman, F.F.2017. *Menyambung Indonesia, Jokowi Bangun Tol Laut*. Detik Finance, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3784520/menyambung-indonesia-jokowi-bangun-tol-laut>